

**Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelesaian Konflik
Tata Batas Wilayah Antara Kabupaten Sambas Dengan
Kabupaten Bengkayang**

HARY WIBOWO, SH

A.21212077

Prof.Dr.H.Kamarullah,SH.,M.Hum Hamdani,SH.,M.Hum

Abstrak

Tesis ini membahas tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelesaian konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum dapat menyelesaikan konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang dan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat tidak terselesaikannya konflik tata batas wilayah tersebut.

Melalui studi kepustakaan dan lapangan menggunakan metode pendekatan hukum empiris serta metode penelitian kualitatif diperoleh kesimpulan, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelesaian konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang adalah memfasilitasi dan meminta Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) dari kedua kabupaten untuk menyelesaikan terlebih dahulu di tingkat kabupaten dengan melakukan survei lapangan bersama dengan mengacu pada dokumen dan data dari masing-masing kabupaten serta menyepakati hasil survei lapangan tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan, baru dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum dapat menyelesaikan konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

1. Belum ada kesepakatan mengenai titik batas (koordinat) dari kedua kabupaten;

2. Alokasi anggaran dari APBD Provinsi untuk fasilitasi penyelesaian tata batas sangat terbatas;
3. Banyaknya segmen batas yang ditangani oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebanyak 21 segmen batas;
4. Kondisi alam dan medan yang sulit untuk melakukan pengecekan titik batas dari kedua kabupaten; dan
5. Peta dasar (dokumen) yang berbeda dari kedua kabupaten, sehingga diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan titik batas (koordinat) yang tepat agar dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat tidak terselesaikannya konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang adalah:

1. Ketidakjelasan cakupan wilayah administrasi untuk penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah;
2. Inefisiensi pelayanan kepada masyarakat (duplikasi);
3. Ketidakjelasan luas wilayah;
4. Ketidakjelasan administrasi kependudukan;
5. Ketidakjelasan daerah pemilihan berkenaan dengan Pemilu dan Pilkada;
6. Ketidakjelasan administrasi pertanahan;
7. Ketidakjelasan perijinan pengelolaan sumber daya alam; dan
8. Kesulitan pengaturan tata ruang daerah.

Kata kunci : kebijakan – konflik – tata batas wilayah.

Abstract

This thesis discusses the policy of the Government of West Kalimantan in the resolution of conflicts between the boundaries between the Sambas district Bengkayang. In addition, it also has the goal of which is to reveal and analyze the factors that constrain the Government of West Kalimantan can not resolve the conflict between the boundaries between the Sambas district Bengkayang and impact as a result of the conflict is not solved, the region boundaries. Through the study of literature and the field of law approach using empirical and qualitative research

methods can be concluded, that the policy pursued by the Government of West Kalimantan in the resolution of conflicts between the boundaries between the Sambas district Bengkayang is facilitated and ask Region Emphasis Team (Team PBD) from both districts to finish first in the district to conduct a field survey along with a reference to the documents and data from each district, and agree on the results of the field survey. If there is no agreement, the new delegated to the Government of West Kalimantan Province.

The factors that constrain that West Kalimantan provincial government has not been able to resolve the conflict between the region boundaries with Bengkayang Sambas district are as follows:

1. There is no agreement on the boundary points (coordinates) of the two districts;
2. The allocation of the budget of the provincial budget to facilitate the settlement of the boundary is very limited;
3. The number of boundary segments are handled by Region Emphasis Team West Kalimantan as many as 21 segments of the boundary;
4. Natural conditions and terrain that is difficult to check the boundary points of the second district; and
5. the base map (documents) which is different from both districts, so that the necessary rigor and prudence in determining the boundary points (coordinates) the right to be accepted by both parties.

While the overall impact as a result of the conflict is not solved, the boundary region between the Sambas district Bengkayang are:

1. Lack of clarity scope of the authority administrative area for Local Government;
2. Public service inefficiencies (duplication);
3. An area of vagueness;
4. The vagueness of administration;
5. The lack of clarity is pleased with constituency elections and local elections;
6. The lack of clarity in land administration;

7. The ambiguity permitting the management of natural resources; and
8. The difficulty of the spatial arrangement.

Keywords: policy - conflict - lack of clear boundaries.

A. Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, satu di antaranya adalah mengenai penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya.

Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan 2 (dua) kemungkinan akibat negatif.

Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.

Kekaburan batas daerah mungkin juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar daerah karena

potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan mungkin juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan.

Namun demikian, penetapan batas daerah secara fisik dan pasti di lapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing-masing daerah.

Penetapan batas daerah secara fisik dan pasti juga berhubungan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal ini, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan di dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar setiap wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan percepatan penyelesaian penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan.

Demikian juga mengenai batas daerah antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas di lapangan yang belum tegas, artinya belum disepakati antara kedua daerah bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah hingga sekarang (Tahun Anggaran 2013). Meskipun kegiatan penataan batas daerah telah dikoordinasikan dan diagendakan, khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Sambas sejak Tahun 2005 (Masa efektif mulai berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004).

Kabupaten Sambas sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (LNRI Nomor 72 Tahun 1959 Tambahan LNRI Nomor 1820). Pembentukan Kabupaten Sambas mulai terealisasi dan sejak tahun 1963 sistem kewedanaan dihapuskan sehingga wilayah Pemerintahan Kabupaten Sambas berubah menjadi 15 wilayah kecamatan dan pada tahun 1988 kemudian berubah menjadi 19 kecamatan, di mana 2 kecamatan di antaranya merupakan daerah Pemerintahan Kota Administratif Singkawang.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang, maka kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas pindah dari Kota Singkawang ke Kota Sambas, sehingga wilayah Kabupaten Sambas tinggal 9 Kecamatan saja.

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selakau, Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Kecamatan Sejangkung, dan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunyit, Kecamatan Toho, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Menyuke, dan Kecamatan Air Besar Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Salah satu masalah belum dicapainya kesepakatan mengenai titik-titik batas antara kedua daerah ini terutama menyangkut bagian wilayah yang mungkin dianggap memiliki nilai strategis oleh kedua belah pihak. Persoalan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis mengaplikasikan batas yuridis dari undang-undang pembentukan daerah ke bentuk fisik lapangan, namun tentunya lebih kompleks dari hal tersebut sehingga kesepakatan antara kedua pihak belum

dapat tercapai hingga sekarang. Dalam hal ini persoalan penegasan batas daerah menjadi sebuah konflik kelembagaan yang berkepanjangan antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang.

Konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang terjadi di beberapa wilayah kecamatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kecamatan Subah Kabupaten Sambas yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sambas dengan Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.
- b. Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas dengan Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang.
- c. Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang.

Hal itulah yang menarik bagi Penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai konflik dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang tersebut yang belum kunjung selesai pemecahannya.

Sebagai bahan perbandingan bahwa batas daerah Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang telah diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, seharusnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menyelesaikan konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang.

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelesaikan konflik tata batas di wilayah Kabupaten/Kota adalah Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana disebutkan bahwa: “Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelesaian konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum dapat menyelesaikan konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang ?
3. Dampak apa saja yang ditimbulkan sebagai akibat tidak terselesaikannya konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang ?

C. Analisis Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang diindikasikan dengan belum disepakatinya batas fisik di beberapa titik batas meskipun upaya penetapan batas fisik telah dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lama.

Intensitas konflik tata batas wilayah kabupaten terjadi karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Sambas, di mana Kabupaten Sambas terpecah menjadi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Intensitas konflik semakin meningkat dan jelas ketika Pemerintah Kabupaten Sambas mulai mengintensifkan kegiatan penataan batas wilayah dan mendapatkan reaksi dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupa disepakatinya sejumlah titik batas daerah dan juga tidak disepakatinya beberapa titik batas lainnya hingga sekarang.

Setidaknya ada 3 (tiga) bagian wilayah yang masih menjadi obyek konflik dan kemungkinan yang terjadi kedua pihak memandang obyek tersebut memiliki “nilai” yang patut dipertahankan. Wilayah tersebut meliputi wilayah kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sambas dengan Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, khususnya Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah berbatasan dengan Desa Belimbing Kecamatan Ledo.
- 2) Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas dengan Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang, khususnya Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur berbatasan dengan Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang.
- 3) Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan Kecamatan Lumar dan Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang, Desa Bukit Segoler Kecamatan Tebas berbatasan dengan Desa Kinande Kecamatan Lumar dan Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas dengan Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang.

Atas terjadinya konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang, maka kedua kabupaten membentuk Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD). Namun Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) dari kedua kabupaten belum memperoleh kesepakatan dalam menentukan tata batas wilayah, hal ini disebabkan karena:

- Belum adanya kejelasan mengenai batas (koordinat) antar kedua kabupaten berdasarkan dokumen masing-masing kabupaten terdapat perbedaan titik batas, sehingga menimbulkan dua versi.
- Belum ada pemetaan dan pengukuran yang definitif mengenai batas wilayah dari masing-masing kabupaten.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 198 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila terjadi perselisihan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, gubernur menyelesaikan perselisihan tersebut, dan apabila perselisihan

antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan tersebut dan keputusan ini adalah bersifat final. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi menjelaskan, pada Pasal 4 salah satu wewenang Gubernur yaitu menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Dalam menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota gubernur melakukan langkah antara lain persuasi dan negosiasi serta membangun kerjasama antar daerah. Perselisihan antar kabupaten/kota salah satunya mencakup perselisihan tentang perbatasan antar kabupaten/kota.

Mengingat permasalahan tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang semakin berlarut-larut dan belum ada penyelesaian secara damai antar kedua daerah yang bermasalah, maka kedua daerah yang bersangkutan yaitu Pemerintah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang menyerahkan masalah ini ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang, maka kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah memfasilitasi dan meminta Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) dari kedua kabupaten untuk menyelesaikan terlebih dahulu di tingkat kabupaten dengan melakukan survei lapangan bersama dengan mengacu pada dokumen dan data dari masing-masing kabupaten serta menyepakati hasil survei lapangan tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan, baru dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jika telah ada kesepakatan antar kedua daerah yang bermasalah, dan keputusan bersama yang diambil bersama Gubernur serta mendapat hasil yang tepat mengenai konflik tata batas daerah, maka kedua daerah yang bersangkutan harus menerima semua keputusan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur karena semua keputusan Gubernur adalah sah dan bersifat final.

Sehubungan dengan terjadinya konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang, maka faktor-faktor yang

menjadi kendala sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum dapat menyelesaikan konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- 1) Belum ada kesepakatan mengenai titik batas (koordinat) dari kedua kabupaten.
- 2) Alokasi anggaran dari APBD Provinsi untuk fasilitasi penyelesaian tata batas sangat terbatas.
- 3) Banyaknya segmen batas yang ditangani oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebanyak 21 segmen batas.
- 4) Kondisi alam dan medan yang sulit untuk melakukan pengecekan titik batas dari kedua kabupaten.
- 5) Peta dasar (dokumen) yang berbeda dari kedua kabupaten, sehingga diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan titik batas (koordinat) yang tepat agar dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Berkenaan dengan belum diselesaikannya konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang, maka menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut:

- 1) Ketidakjelasan cakupan wilayah administrasi untuk penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah;
- 2) Inefisiensi pelayanan kepada masyarakat (duplikasi);
- 3) Ketidakjelasan luas wilayah;
- 4) Ketidakjelasan administrasi kependudukan;
- 5) Ketidakjelasan daerah pemilihan berkenaan dengan Pemilu dan Pilkada;
- 6) Ketidakjelasan administrasi pertanahan;
- 7) Ketidakjelasan perijinan pengelolaan sumber daya alam;
- 8) Kesulitan pengaturan tata ruang daerah.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Menutup uraian penelitian tesis ini, maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelesaian konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang adalah memfasilitasi dan meminta Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) dari kedua kabupaten untuk menyelesaikan terlebih dahulu di tingkat kabupaten dengan melakukan survei lapangan bersama dengan mengacu pada dokumen dan data dari masing-masing kabupaten serta menyepakati hasil survei lapangan tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan, baru dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- b) Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum dapat menyelesaikan konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut: (1) Belum ada kesepakatan mengenai titik batas (koordinat) dari kedua kabupaten; (2) Alokasi anggaran dari APBD Provinsi untuk fasilitasi penyelesaian tata batas sangat terbatas; (3) Banyaknya segmen batas yang ditangani oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebanyak 21 segmen batas; (4) Kondisi alam dan medan yang sulit untuk melakukan pengecekan titik batas dari kedua kabupaten; dan (5) Peta dasar (dokumen) yang berbeda dari kedua kabupaten, sehingga diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan titik batas (koordinat) yang tepat agar dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- c) Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat tidak terselesaikannya konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang adalah: (1) Ketidakjelasan cakupan wilayah administrasi untuk penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan

Daerah; (2) Inefisiensi pelayanan kepada masyarakat (duplikasi); (3) Ketidakjelasan luas wilayah; (4) Ketidakjelasan administrasi kependudukan; (5) Ketidakjelasan daerah pemilihan berkenaan dengan Pemilu dan Pilkada; (6) Ketidakjelasan administrasi pertanahan; (7) Ketidakjelasan perijinan pengelolaan sumber daya alam; dan (8) Kesulitan pengaturan tata ruang daerah.

2. S a r a n

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Masing-masing pihak perlu melakukan evaluasi terhadap upaya mewujudkan kesepakatan dalam penegasan batas daerah yang tengah dilaksanakan dan hingga kini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Evaluasi tersebut dimulai dari koreksi internal masing-masing kabupaten yang mencakup evaluasi kinerja “pelaksana” kegiatan penegasan batas daerah, sehingga tindak lanjut dari evaluasi diharapkan dapat menyelesaikan konflik tata batas wilayah dari kedua kabupaten tersebut.
- b) Selama masalah konflik tata batas daerah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk diproses, maka untuk kedua daerah yang bersangkutan yaitu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang diharapkan agar dapat bekerja sama dengan baik dengan tidak adanya bentrok antar kedua warga dari kedua kabupaten tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur / Buku :

Aditya Batara G., dan Beni Sukadis (editor), *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi*, Jakarta: DCAF & LESPERSI, 2007.

Agus Dwiyanto, et.al, *Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Boedi Wijardjo, et.al, (editor), *Konflik, Bahaya atau Peluang ? : Panduan Latihan Menghadapi dan Menangani Konflik Sumber Daya Alam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2001.

Brian Taylor Summer dalam Aditya Batara G & Beny Sukadis, (Editor), *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi*, Jakarta: DCAF & LESPERSI, 2007.

Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah (Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.

J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.

Kartika Sari, et.al., *Mengelola Konflik: Keterampilan Startegi Untuk Bertindak* (terjemahan), Jakarta: The British Council Government and Society Unit, 2005.

Maria S.W. Sumardjono, *Applications of Case Study Research*, New Delhi: Sage Publications International Educational and Profesional Publisher Newbury Park, 1993.

Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 2001.

Moh. Kusnardi, dkk, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Nikmatul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Pratikno, et.al., *Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah (edisi ke-2)*, Yogyakarta: Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, 2004.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sri Sumantri dan Bintan R. Saragih, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia (30 tahun kembali ke Undang-Undang Dasar 1945)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Malang: Penerbit Asah-Asih-Asuh, 1990.

Syamsul Hadi, et.al, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Siti R. Zuhro, et.al, *Konflik & Kerjasama Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2004.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2004.

Yosep Riwukaho, *Otonomi yang Titik Beratnya Diletakkan Pada Daerah Tingkat II*, Yogyakarta: UGM Press, 1980.

Jurnal / Makalah / Artikel / Internet :

Depkimpraswil, "*Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara*", Jakarta, 2002.

Eddy MT Sianturi dan Nafsiah SP., "*Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRP*", email: buletinlitbang@dephan.go.id., 2006.

Hari Sabarno, "*Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan*", <http://www.depdagri.go.id>., 2001.

Istislam, "*Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*", Arena Hukum No. 10 Tahun 4, Maret 2002.

Jurnal Nasional, "*Konflik Tapal Batas Berkepanjangan Bahayakan Warga*", Rabu 9 November 2011, www.jurnas.com

Mursyridyansyah, *Konflik Tapal Batas: Studi Kasus Mengenai Sebab-sebab dan Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu*, Thesis, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, 2007, (tidak dipublikasikan).

Pramono S., dan Susie Berindra, "*Pemekaran Tak Lagi Jadi Obat Mujarab*", Kompas Edisi Rabu 30 Agustus 2006 (Politik dan Hukum), Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I, II, III, dan IV.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

